

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
INTISARI	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Bisnis Militer Sebagai Persoalan Profesionalisme.....	2
1.2. Bisnis Militer Menyebabkan Konflik Agraria	6
1.3. Review Literatur	7
1.4. Pertanyaan Penelitian.....	12
BAB II KERANGKA ANALISIS	13
2.1. Militer dan Demokrasi	13
2.1.1. Penegakan Supremasi Sipil dalam Debat.....	13
2.1.2. Pretensi Ke-arah Demokratisasi.....	16
2.2. Reformasi TNI	20
2.2.1. Profesionalisme TNI: Paradigma Modern dan Posmodern.....	22
2.2.2. Beberapa Pandangan Alternatif	25
2.3. Penataan Bisnis Militer	31
2.4. Kerangka Berpikir.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
3.1. Pendekatan Penelitian	40
3.2. Sumber Informasi dan Jenis Data	41
3.2.1. Observasi Kualitatif	42
3.2.2. Wawancara Kualitatif	42
3.2.2. Dokumen Kualitatif.....	44
3.3. Analisis dan Pengujian Data	45
BAB IV POLITIK DAN BISNIS MILITER	46
4.1. Kemunculan Bisnis Militer di Morotai	46
4.2. Konteks Nasional	55

4.3.	Orde Baru: Tentara Sebagai Kelas Pebisnis (1965-1999).....	61
BAB V PENATAAN BISNIS MILITER PASCA REFORMASI		65
5.1.	Dinamika Kebijakan Penataan Bisnis Militer.....	66
5.1.1.	Politik Anggaran Pertahanan	67
5.1.2.	Kekuatan Pendorong Reformasi TNI Belum Bersiap	70
5.1.3.	Penataan Bisnis Militer Setengah Hati.....	73
5.1.4.	Penataan BMN: Rezim Baru Bisnis Militer.....	76
5.2.	Penataan BMN di Lanud Leo Wattimena	81
5.2.1.	Lanud Menata Tanah Bermasalah.....	81
5.2.2.	Respon Pemda.....	84
5.2.3.	Diarahkan untuk Pinjam Pakai.....	87
5.2.4.	MoU Pinjam Pakai dan Kepentingan Mafia Pembebasan Lahan	90
BAB VI BISNIS MILITER DAN KONFLIK AGRARIA DI LANUD LEO WATTIMENA		108
6.1.	Memanfaatkan Kontrol Objektif Sipil di Tengah Ketimpangan Kelas.....	109
6.1.1.	Bisnis Militer dan Relasi Kekuasaan di Morotai	113
6.1.2.	Hubungan-Sipil Militer dalam Forkopimda.....	114
6.2.	Praktek Bisnis Militer di Lanud Leo Wattimena	120
6.3.	Jenis-jenis Bisnis Militer di Lanud Leo Wattimena.....	123
6.3.1.	Menyewakan Tanah	126
6.3.2.	Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP-BMN)	130
6.3.3.	Penjualan Air Bersih	138
6.4.	Pelemahan Politik Kelas Pekerja	140
6.4.1.	Pengerahan Kekuatan Militer`	140
6.4.2.	Membentuk Komunitas Intelijen Daerah	143
6.6.	Implikasi Bisnis Militer	146
BAB VII KESIMPULAN		151
DAFTAR PUSTAKA		153